



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : UM.02.03/C.III/4528/2023

29 Mei 2023

Lampiran : empat lembar

Hal : Himbauan Pemanfaatan Pelatihan Jarak Jauh Daring Penuh
Penanggulangan Tuberkulosis untuk Tenaga Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta

Yth. Daftar Terlampir

Dalam upaya kesinambungan Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) yang berkualitas dan upaya percepatan pelaksanaan Program Penanggulangan TBC, maka diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan TBC yang terampil serta mampu melaksanakan program dan tata laksana pasien TBC secara baik dan sesuai standar. Seiring dengan meningkatnya peran serta, keterlibatan, dan kontribusi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam program penanggulangan TBC, Kementerian Kesehatan berinovasi meluncurkan sistem pelatihan *Full online* atau *e-learning* yang ditujukan kepada dokter, perawat, petugas farmasi, dan petugas laboratorium di fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Pelatihan *e-learning* TBC tanpa tutor, belajar secara mandiri dengan total 31 modul interaktif mencakup penatalaksanaan mulai dari penemuan, penegakan diagnosa, pengobatan, dan pelaporan untuk menjangkau peserta yang lebih banyak dan geografis yang lebih luas dibandingkan dengan metode pelatihan konvensional, serta dapat menyediakan model pelatihan yang lebih fleksibel dalam segi waktu karena sistem *e-learning* dapat diakses kapanpun. *e-learning* Tuberkulosis sudah di-*launching* secara resmi pada tanggal 17 Maret 2023 dan juga sudah dilakukan sosialisasi sebanyak 3 *batch* masing-masing pada tanggal 14 April 2023, 17 April 2023 dan 17 Mei 2023 dengan estimasi target sasaran faskes sebanyak 1.959 RS Swasta, 10.327 Klinik dan 2.425 Dokter Praktik Mandiri dengan total target sasaran minimal 30.915 tenaga kesehatan dan *link* materi sosialisasi *e-learning* dapat diakses melalui link https://bit.ly/Materi_Sosialisasi_ElearningTBC.

Untuk itu, kami mengimbau **Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Fasyankes** untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan mengadvokasi fasilitas kesehatan swasta di wilayah kerjanya untuk ikut dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan mengakses pelatihan *e-learning* melalui <https://lms.kemkes.go.id/>.

2. Dinas Kesehatan memastikan seluruh tenaga kesehatan di wilayahnya terdaftar dalam SI-SDMK (Sistem Informasi SDM Kesehatan) supaya data tenaga kesehatan dapat terintegrasi, dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama untuk pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
3. Organisasi Profesi mengimbau dan mengadvokasi anggota profesinya untuk dapat turut serta dalam peningkatan kapasitas melalui *e-learning* Tuberkulosis
4. Dinas Kesehatan, organisasi profesi dan mitra melakukan perluasan diseminasi informasi mengenai akses *e-learning* secara langsung ataupun melalui platform elektronik seperti media sosial

Demikian Himbuan Pemanfaatan Pelatihan Jarak Jauh Daring Penuh Penanggulangan Tuberkulosis untuk Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan dengan maksimal. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Suhardini, SKM, MKM (Hp 081374460942) dan Sdri. Nadia Nursyavidha Putrie, SKM (Hp 081222116299), email: subdittb@tbindonesia.or.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular,



dr. Imran Pambudi, MPH

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Lampiran 1

Nomor : UM.02.03/C.III/4528/2023

Tanggal : 29 Mei 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

34. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
35. Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
36. Direktur PT. Medikaloka Hermina, Tbk
37. Direktur PT. Pertamina Bina Medika IHC
38. Direktur PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk
39. Direktur PT. Siloam International Hospitals, Tbk
40. Direktur PT. Famon Awal Bros Sedaya, Tbk
41. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
42. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
43. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (Patelki)
44. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (Pds PatKlin)
45. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
46. Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
47. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)
48. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)
49. Ketua Perhimpunan Klinik & Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)

Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular,



dr. Imran Pambudi, MPHM

Lampiran 2

Nomor : UM.02.03/C.III/4528/2023

Tanggal : 29 Mei 2023

Estimasi Jumlah Target Tenaga Kesehatan Mengikuti E-learning Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Estimasi Minimal Jumlah Target Tenaga Kesehatan Mengikuti e-learning		
		RS Swasta	Klinik	DPM	RS Swasta*	Klinik**	DPM***
1	Aceh	39	238	39	156	476	39
2	Sumatera Utara	154	591	75	616	1182	75
3	Sumatera Barat	46	185	15	184	370	15
4	Riau	52	220	80	208	440	80
5	Kepulauan Riau	18	218	6	72	436	6
6	Jambi	21	120	84	84	240	84
7	Sumatera Selatan	45	349	125	180	698	125
8	Bangka Belitung	14	81	23	56	162	23
9	Bengkulu	8	61	52	32	122	52
10	Lampung	60	364	7	240	728	7
11	Banten	105	602	62	420	1204	62
12	DKI Jakarta	138	1022	247	552	2044	247
13	Jawa Barat	313	1923	342	1252	3846	342
14	Jawa Tengah	247	1345	421	988	2690	421
15	DI Yogyakarta	65	152	18	260	304	18
16	Jawa Timur	298	1299	463	1192	2598	463
17	Kalimantan Barat	24	88	6	96	176	6
18	Kalimantan Tengah	8	116	4	32	232	4
19	Kalimantan Selatan	29	126	2	116	252	2
20	Kalimantan Timur	31	210	13	124	420	13
21	Kalimantan Utara	2	32	18	8	64	18
22	Sulawesi Utara	24	24	5	96	48	5
23	Gorontalo	5	35	8	20	70	8
24	Sulawesi Tengah	10	69	8	40	138	8
25	Sulawesi Selatan	61	238	51	244	476	51
26	Sulawesi Barat	5	9	1	20	18	1

27	Sulawesi Tenggara	17	50	4	68	100	4
28	Bali	49	204	106	196	408	106
29	Nusa Tenggara Barat	20	152	80	80	304	80
30	Nusa Tenggara Timur	23	93	37	92	186	37
31	Maluku	8	25	10	32	50	10
32	Maluku Utara	5	19	11	20	38	11
33	Papua	10	53	2	40	106	2
34	Papua Barat	5	14	0	20	28	0

*target untuk RS Swasta : jumlah RS swasta dikalikan 4 profesi (minimal masing masing 1 dokter, perawat, ATLM, Farmasi)

**target untuk Klinik : jumlah klinik dikalikan 2 profesi (minimal masing masing 1 perawat dan dokter)

*** target untuk DPM : jumlah DPM dikalikan 1 profesi (minimal 1 dokter)

Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular,



dr. Imran Pambudi, MPH